

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya teknologi terutama teknologi informasi terdapat suatu fenomena yaitu globalisasi. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Menurut Selo Soemardjan globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Tujuan globalisasi adalah untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama misalnya terbentuknya beberapa institusi internasional. Adapun globalisasi mendukung adanya kerjasama baik di bidang teknologi, ekonomi, politik, keamanan, budaya maupun di bidang lainnya. Globalisasi mendorong aktor-aktor Hubungan Internasional dalam melakukan interaksi antar satu dengan yang lainnya baik actor negara maupun actor non negara. Hubungan yang saling terkait antara bangsa dan manusia melalui informasi, perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk interaksi lainnya. Dari interaksi ini negara yang satu dengan lainnya hampir tidak memiliki batas.

Kehadiran globalisasi pasca Perang Dingin sangat memberikan keleluasaan bagi negara-negara maju untuk mengembangkan segala hal yang dimilikinya dalam ruang lingkup global. Clark (2001) dalam artikelnya yang berjudul *Globalization and The Post-Cold War Order*, berpendapat bahwa ada sebuah kecenderungan untuk menganggap globalisasi sebagai hasil

konsekuensi dari berakhirnya Perang Dingin. Pasca kalahnya Uni Soviet pada Perang Dingin dan menyebabkan negara ini runtuh kemudian menjadikan Amerika Serikat menjadi negara yang dominan dan krusial dalam berbagai hal seperti politik, ekonomi, budaya maupun kemanan pada tataran internasional. Amerika Serikat sendiri menganut ideologi liberal dimana ideologi ini menitikberatkan pada kebebasan, yakni kebebasan pasar atau individu yang terlepas pada peran negara, dapat dikatakan peran negara sangat diminimalisir. Pasca era Perang Dingin Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara demokrasi agar hak asasi manusia dapat dijamin.

Globalisasi telah membuat aspek-aspek kehidupan manusia menjadi berkembang, berubah dan bergeser. Sejak era Perang Dingin, pengaruh globalisasi cenderung menekankan pada perkembangan proyek ekonomi dan politik. Amerika Serikat berupaya untuk menggiring negara-negara lain mengikuti ideologi yang dianutnya dengan berbagai upaya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Konsensus Washington dimana dikemukakan oleh ekonom John Williamson, yang praktis dihasilkan oleh para ekonom beraliran liberal dan konservatif. Konsensus Washington mengenai pengaturan, privatisasi, stabilitas moneter dan fiskal, dan lain sebagainya yang semuanya dilakukan untuk mempertahankan posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan (Callinicos, 2007). Konsensus Washington berbicara mengenai monetarism, deregulasi, privatisasi, liberalisasi perdagangan dan pasar keuangan dan promosi pertumbuhan ekspor. Berlangsungnya globalisasi berujung pada berlakunya sistem kapitalisme di dunia internasional. dan Amerika-lah pemegang “saham” dominansi penuh berlangsungnya globalisasi. Tidak hanya melalui Konsensus Washington, Amerika Serikat membuat tiga institusi internasional keuangan yaitu International Monetary Fund, World Bank dan World Trade Organization.

Secara umum berbagai arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan tujuan nasionalnya yaitu memantapkan diri di dunia sebagai polisi dunia, dominasi sumber daya alam, orientasi ekonomi, penyebaran ideology liberalism dan demokrasi, keamanan nasional dan pemberantasan terrorisme, dan mewujudkan tatanan dunia baru. Dalam format politik internasional Amerika Serikat terdapat dua pilar paling mengemuka yang dijadikan kebijakan pokok negara adidaya itu adalah demokratisasi (termasuk HAM) dan liberalisme ekonomi dunia. Dengan dianutnya paham liberal di berbagai aspek yang diperkenalkan oleh Amerika Serikat terutama di bidang perekonomian menuntut peran negara meminimalkan perannya dan lebih memberi keleluasaan pada pasar untuk menentukan.

Dengan tersebar luasnya paham liberalism maka membuat banyak lembaga internasional bermuculan. Seperti yang disebutkan oleh Dunne (2001) terdapat tiga bentuk dari liberalisme, yaitu liberal institusionalisme, liberal internationalisme dan idealisme. Pemikiran-pemikiran liberal institusionalisme adalah pentingnya pruralisme aktor dalam hubungan internasional seperti MNCs, IGOs, dan NGOs, yang menganggap peran serta aktor non-negara dalam hubungan antarnegara adalah suatu hal yang penting, serta menekankan pentingnya adanya suatu bentuk interaksi baru antarnegara seperti integrasi dan kerjasama. Integrasi dan kerjasama transnasional merupakan hal yang diperlukan karena setiap negara memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga dalam menghindari keterbatasan tersebut suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain. Tidak hanya actor negara saja, paham liberalisme juga menyebutkan bahwa actor non negara juga mampu untuk mengadakan kegiatan kerjasama dan paham liberalism pula mendukung dengan semakin bertambahnya lembaga-lembaga internasional demi menciptakan integrasi antar actor.

Pada bulan Oktober 2013 Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mendirikan AIIB/ Asian Infrastructure Investment Bank dengan tujuan untuk menyediakan dana bagi program infrastruktur di Asia. Menurut Lou Jiwei, menteri keuangan Cina, hingga kini tercatat 57 negara yang menyatakan kesediaannya bergabung dengan AIIB. Republik Rakyat Tiongkok sebagai inisiator dan investor terbesar di AIIB secara praktis menjadi pemimpin gerakan ekonomi internasional ini. Tujuan dari pembentukan AIIB adalah membantu pengembangan infrastruktur kawasan Asia dan Pasifik. Gagasan pembentukan Asian Infrastructure Asia Investment Bank (AIIB) dicetuskan oleh Xi Jinping, Presiden China, sebelum pertemuan APEC Oktober 2013 di Bali. Usulan ini cukup beralasan dengan ide dasar mempercepat pembangunan dan integrasi ekonomi di Asia dan mendorong pembangunan infrastruktur dan pembangunan kawasan Asia. Tujuan pembentukan AIIB adalah (i) untuk mendukung konektivitas, integrasi, dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan serta meningkatkan daya saing negara-negara Asia (ii) untuk memenuhi *gap* dalam pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat dipenuhi oleh Bank Pembangunan Multilateral lain.

Adapun proses pembentukan AIIB sendiri dilakukan dengan diadakannya pertemuan pada level pertemuan tingkat Menteri Keuangan dengan mengadakan pembahasan pembentukan AIIB di Astana Kazakhtsan. Pada pertemuan Konsultasi Pertama tanggal 24 Januari 2014 membahas Memorandum of Understanding (MoU). Pertemuan ini dihadiri oleh 15 Negara, yang terdiri dari 10 Negara ASEAN, RRT, Pakistan, Mongolia, Sri Lanka, dan Korea Selatan. Pertemuan Konsultasi Multilateral kedua tanggal 28 Maret 2014, membahas mengenai perkembangan elemen kunci MoU Pembentukan AIIB, serta besaran kontribusi dimana RRT sebagai inisiator berkomitmen untuk berkontribusi sebesar 50% dari authorised capital—USD50 Miliar. Pada pertemuan Konsultasi Multilateral Ketiga tanggal 9-10 Juni 2014 dihadiri oleh 22

Negara. Pertemuan ini membahas mengenai jumlah authorised capital menjadi USD100 Miliar. RRT mengusulkan Beijing sebagai lokasi kantor pusat AIIB. Pertemuan Konsultasi Multilateral Keempat tanggal 7-8 Agustus 2014. Jumlah Negara yang hadir berjumlah 20 negara. RRT mengusulkan besaran kontribusi berdasarkan GDP dari ke-20 potensial founding member. RRT membuka kembali proses bidding lokasi kantor pusat., dalam Pertemuan Konsultasi Multilateral Kelima pada tanggal 26-28 September 2014 dengan agenda menyatakan komitmen untuk bergabung menandatangani MoU

Walaupun AIIB terbilang baru, banyak negara yang memulai dan tertarik untuk bergabung dengan AIIB. Negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik menyambut baik dengan adanya AIIB dan mulai bergabung, selain itu AIIB menarik perhatian dari negara-negara Afrika dan Eropa lainnya. Terdapat 57 negara yang sudah bergabung menjadi anggota AIIB seperti yang dilansir vivanews.com pada tanggal 15 April 2015 dimana Norwegia menjadi negara ke-57 yang menjadi anggota AIIB. Adapun 56 negara anggota lainnya selain Republik Rakyat Tiongkok adalah ; Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Brazil, Brunei, Kamboja, Denmark, Mesir, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Islandia, India, Indonesia, Iran, Israel, Italy, Yordania, Kazakhstan, Korea Selatan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Luxemburg, Malaysia, Maladewa, Malta, Mongolia, Myanmar, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, man, Pakistan, Filipina, Polandia, Portugal, Qatar, Rusia, Saudi Arabia, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Switzerland, Thailand, Uni Emirat Arab, Turki, Vietnam.

AIIB memiliki daya tarik yang kuat bagi sejumlah negara sehingga negara-negara tersebut bersedia untuk menjadi anggota AIIB walaupun beberapa negara berada diluar wilayah Asia Pasifik. AIIB bahkan menarik perhatian sejumlah negara-negara Eropa yang tidak jarang sering bersebrangan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Dapat terlihat Inggris, Italia, Perancis

dan beberapa negara Eropa lainnya memberikan tanggapan positif dan akhirnya berkomitmen menjadi negara anggota AIIB. Namun walaupun negara-negara Eropa tersebut menanggapi dengan positif dengan terbentuknya AIIB, lain hal dengan Amerika Serikat. Negara Adidaya ini terlihat cenderung bersikap dingin dan memberikan tanggapan yang pasif terhadap pembentukan AIIB. Pendirian AIIB ini sendiri mendapat tanggapan yang “dingin” dari AS, meskipun sekutu AS lain termasuk Inggris, Perancis, Jerman dan Italia telah mengumumkan niat mereka untuk bergabung dan akhirnya menjadi bagian dari AIIB (vizbisnews, 2015).

Amerika Serikat memiliki beberapa peluang yang cukup strategis apabila bergabung dengan AIIB. Amerika Serikat akan mampu mempengaruhi jalannya AIIB, memastikan bahwa setiap prosesnya berjalan transparan, mampu menempatkan insentif yang bergerak pada proyek sumber daya manusia ataupun isu perubahan iklim. Bergabung dengan AIIB seharusnya mampu menjadikan Amerika Serikat sebagai negara yang mampu mempengaruhi jalannya AIIB mengingat Amerika Serikat sendiri memiliki power dan pengaruh yang cukup signifikan dengan negara-negara anggota lainnya (Muro, 2015).

Amerika Serikat mempertegas sikap dan posisinya terhadap pembentukan AIIB dengan memberikan tanggapan negative terhadap beberapa negara anggota koalisinya atas bergabungnya Inggris, Australia, Korea Selatan yang notabene adalah negara-negara aliansi Amerika Serikat sendiri. Gedung Putih memberikan tanggapannya atas bergabungnya Inggris dengan mengungkapkan kekecewaan bahwa seharusnya Inggris harus lebih mempertimbangkan langkahnya dalam bergabung dengan AIIB (Branigen *et. al.*, 2015). Atas tanggapan tersebut terlihat bahwa Amerika Serikat memberikan tanda-tanda kekhawatiran atas bergabungnya negara tersebut ke dalam AIIB karena Inggris memiliki pengaruh yang cukup signifikan di kawasan Eropa. Adapun Amerika Serikat memberikan tekanan juga terhadap Australia

mengingat negara ini menjadi negara kunci bagi kubu Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik seperti yang disampaikan oleh salah satu pejabat Amerika Serikat di Gedung Putih. Washington memberikan tekanan kepada Australia untuk tetap berada diluar AIIB walaupun pada akhirnya negara ini turut bergabung AIIB (Parker, *et. al.*, 2015).

Amerika Serikat juga masih menganggap dan mempertanyakan kredibilitas AIIB yang masih dianggap kurang untuk disebut sebagai lembaga internasional . Amerika Serikat memberi tanggapan terhadap pembentukan AIIB bahwa AIIB hanyalah sebagai pelengkap institusi internasional, bukan menjadi institusi internasional yang utama karena Amerika Serikat masih menganggap AIIB belum memiliki kualifikasi standar yang dianggap pantas sebagai sebuah institusi internasional seperti tata kelola kelembagaan, aturan kredit dan aturan pengadaan(Branigen *et. al.*, 2015). Sikap Amerika Serikat yang berhati-hati walaupun telah menerima kehadiran AIIB seperti yang dikatakan oleh salah satu staff pejabat mengatakan bahwa Amerika harus tetap waspada pada akomodasi yang telah ditawarkan China, dan untuk bergabung ke dalam AIIB bukanlah cara yang terbaik untuk mendapatkan kekuatan yang lebih. Sikap dingin juga terlihat dari pernyataan penolakan negara adidaya ini untuk turut bergabung untuk menjadi negara anggota AIIB dan memilih untuk berada diluar AIIB seperti yang diutarakan oleh Cote (2015) bahwa Amerika Serikat telah menolak bergabung dengan bank multilateral buatan Republik Rakyat Tiongkok walaupun anggota negara aliansi lainnya telah bergabung dengan AIIB dan mempertegas posisinya untuk tetap berada di luar AIIB.

B. Rumusan masalah

Mengapa Amerika Serikat enggan untuk bergabung dengan AIIB?

C. Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan konsep politik kebijakan luar negeri dan konsep kepentingan nasional dan teori rezim internasional.

I. Konsep Kebijakan Politik Luar Negeri

Kebijakan politik luar negeri menurut Rosneau (1976) dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan. demi mewujudkan kepentingan-kepentingan nasionalnya satu negara harus menjalin hubungan dengan negara lain baik secara bilateral, regional, maupun multilateral (Masoe'd, 1994).

Menurut William D. Coplin, kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah proses di mana ada tuntutan dari domestic politics, serta dengan melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi para pembuat kebijakan, yang kemudian meramunya menjadi sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional. William D. Coplin menyebutkan terdapat tiga determinan Tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara :

1. Situasi politik domestik

Bahwa politik dalam negeri hanyalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri negara-negara. Walaupun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu, faktor-faktor lain juga bisa bekerja didalamnya. Kita bisa mencontohkan kepribadian pengambil keputusan atau struktur konsep internasional. faktor-faktor lain itu.

2. Situasi ekonomi dan militer domestic. Maksudnya adalah suatu negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan.

3. Konteks internasional

Suatu produk tindakan politik luar negeri seluruh negara pada masa lampau, sekarang dan masa depan yang mungkin atau diantisipasi (Coplin, 2003)

II. Teori Rezim Internasional

Institusi sosial, termasuk rezim internasional, tumbuh dari interaksi kepentingan para aktor untuk mengkoordinasikan perilaku mereka untuk membuat suatu kerjasama. Dalam pendekatan neoliberalisme, rezim internasional dipandang sebagai perangkat yang memfasilitasi perjanjian dengan memberikan aturan, norma-norma, prinsip-prinsip, dan prosedur yang membantu pelaku untuk mengatasi hambatan seperti ketidakpastian dan biaya transaksi tinggi yang mungkin dihasilkan (Keohane dalam Hasenclever, et. al. 1996 34) Kebijakan luar negeri dan lembaga internasional merupakan alat yang digunakan untuk memperhitungkan keuntungan yang didapat oleh negara, kemudian perhitungan ini diinformasikan sebagai preferensi (fungsi utilitas) aktor (Hasenclever, et. al. 1996, 23).

Teori rezim internasional realisme menekankan pada kapasitas power relative sebagai penjelasan sentral variabel dan titik sensitif negara dalam aspek distribusi kerjasama dan rezim. Realisme menganggap negara sebagai aktor yang mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh kompetitornya dimana fokus utama mereka adalah kelangsungan hidup dan kemandirian negaranya. Sebagai konsekuensinya, kerjasama dengan basis peraturan akan lebih sulit untuk dilakukan (Hasenclever, et. al. 1996, 84). Negara hegemon membuat aturan main dalam kerjasama tersebut dengan pertimbangan keuntungan relatif yang akan diperoleh oleh negara hegemon tersebut, namun juga tidak melupakan timbal balik yang juga akan diperoleh negara-negara yang lebih lemah dalam suatu rezim tersebut.

Dengan dibentuknya AIIB oleh Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat membuat kebijakan politik luar negerinya yaitu memilih untuk tetap berada di luar AIIB dan memberikan sikap yang negative atas pembentukan bank buatan Tiongkok tersebut. Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang enggan untuk bergabung dengan AIIB walaupun negara-negara aliansinya telah menjadi negara anggota AIIB. Amerika Serikat memilih untuk tetap berada di luar AIIB sebagai sikap atas tanggapan pembentukan AIIB buatan Republik Rakyat Tiongkok dan memberikan tanggapan yang bersifat negatif terhadap negara aliansi yang turut menjadi negara anggota. Adapun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat baik yang berasal dari dalam negeri Amerika Serikat (internal) maupun faktor yang berasal dari luar (eksternal) menjadi acuan Amerika Serikat untuk mengambil kebijakan politik luar negerinya.

Dalam pengambilan kebijakan politik luar negerinya, Amerika Serikat mempertimbangkan berbagai hal seperti yang diungkapkan oleh Coplin tentang konsep kebijakan politik luar negeri. Terdapat tiga determinan dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap AIIB. Namun determinan yang cukup terlihat dari kebijakan

Amerika Serikat terhadap AIIB ialah determinan konteks internasional. Kehadiran AIIB bagi Amerika Serikat adalah sebuah ancaman yang dapat mengganggu bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat khususnya di kawasan Asia Pasifik. AIIB menjadi ancaman bagi Amerika Serikat mengingat posisi Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional telah mendominasi selama kurang lebih 70 tahun. Kemudian, kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang sangat penting bagi Amerika Serikat. Dengan munculnya AIIB, Amerika Serikat merasa terganggu dalam menjalankan kebijakan luar negerinya yang berfokus pada kegiatan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.

Kehadiran AIIB sebagai sebuah lembaga multilateral keuangan internasional menjadi sebuah ancaman bagi rezim Amerika Serikat yang telah dibangun kurang lebih 70 tahun melalui World Bank, IMF dan World Trade Organization. Selama 7 dekade Amerika Serikat telah membuat sebuah rezim sebagaimana yang telah diutarakan oleh Hasenclever mengenai rezim internasional dalam pandangan neoliberalisme bahwa Amerika Serikat bersama tiga lembaga keuangan internasional bukannya membuat sejumlah aturan-aturan yang mampu mengatasi hambatan yang dialaminya demi kepentingan Amerika Serikat.

Tiongkok menciptakan AIIB sebagai sebuah lembaga keuangan internasional yang memiliki potensi untuk menggeser posisi Amerika Serikat dalam tata keuangan internasional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam pembentukan AIIB. Kekuatan Tiongkok yang cukup besar hingga mampu membentuk sebuah lembaga keuangan internasional dengan melihat antusiasme negara-negara lain menjadi sebuah alasan kekhawatiran bagi Amerika Serikat di tengah dominasinya yang selama ini telah mengendalikan baik secara ekonomi maupun politik pada tataran internasional melalui AIIB.

D. Hipotesis

Amerika Serikat enggan untuk bergabung dengan AIIB adalah :

1. AIIB menjadi ancaman bagi posisi Amerika Serikat di dalam sistem keuangan internasional.
2. AIIB menjadi hambatan bagi dominasi pasar Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa library research dengan memanfaatkan data-data sekunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang diolah menjadi data dan bisadijadikan bahan kajian dalam penyusunan skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Bab I :

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Kerangka Penulisan, dan Daftar Pustaka.

Bab II :

Merupakan penjelasan tentang AIIB, (sejarah terbentuk AIIB, keanggotaan AIIB, sistem AIIB).

Bab III :

Merupakan penjelasan dan gambaran tentang sikap dan posisi Amerika Serikat terhadap AIIB.

Bab IV :

Merupakan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan posisi Amerika Serikat dengan AIIB.

Bab V :

Berupa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya beserta fakta-fakta dan argumen-argumen yang digunakan dalam seluruh penulisan.